

MODEL TATAKELOLA PARIWISATA BERBASIS KOLABORATIF DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

COLLABORATIVE BASED TOURISM GOVERNANCE MODEL IN SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT

Cecep Wahyudin^{1*}, Robby Firliandoko², Nadia Amalia³, Agra Alfin Zulfa⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Ciawi,
Bogor, Jawa Barat 16720, Indonesia

*Korespondensi: Cecep Wahyudin. Email: cecep.wahyudin@unida.ac.id

(Diterima: 16-04-2024; Ditelaah: 10-Juni-2024; Disetujui: 26-09-2024)

ABSTRACT

Tourism has great potential to improve the economy, create jobs, and support the development of various regions. However, improper tourism management can cause problems such as environmental degradation, excessive tourism and unequal economic benefits. Therefore, it is essential that collaborative-based tourism management can be effective in developing sustainable tourism. This research aims to identify collaborative-based tourism governance research in tourism development. The output of this research is to provide recommendations for a collaborative-based tourism governance model to impact tourism development in the Tenjolaya sub-district, Bogor Regency. The research method used was descriptive qualitative with 28 informants from the sub-district government and the Tenjolaya tourism awareness group. After the data was collected using data collection techniques through observation, interviews, field notes, analytical memos, and document elicitation, the researcher continued the analysis of the data obtained and then confirmed it using data validity techniques. The research results show that tourism governance in Tenjolaya has implemented collaborative governance even though it is still local, so every indicator still needs to be optimally fulfilled using the good tourism governance model and the public-private partnership model. Thus, tourism governance in Tenjolaya must focus on good tourism collaboration so that tourism goals in Tenjolaya can be achieved based on fulfilling indicators that support good tourism governance, good tourism development and good tourism sustainability.

Keywords: Collaborative Governance, Tourism Sustainability, Tourism Development, Tourism Governance.

ABSTRAK

Kepariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan mendukung pembangunan berbagai daerah. Namun, pengelolaan pariwisata yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah seperti degradasi lingkungan, pariwisata yang berlebihan, dan manfaat ekonomi yang tidak merata. Oleh karena itu, sangatlah penting pengelolaan pariwisata berbasis kolaboratif dapat efektif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi penelitian tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif dalam pengembangan pariwisata dengan output dalam penelitian ini yaitu memberikan rekomendasi model tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif sehingga akan berdampak pada pengembangan pariwisata yang ada di kecamatan tenjolaya kabupaten bogor. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan jumlah informan 28 orang yang terdiri dari pihak pemerintah kecamatan dan kelompok sadar wisata tenjolaya. Setelah data terkumpul dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, catatan lapangan dan memo analitik serta elisitasi dokumen maka peneliti melanjutkan analisa pada data yang telah di dapatkan kemudian dikonfirmasi dengan teknik keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatakelola pariwisata di tenjolaya sudah menerapkan tatakelola yang kolaboratif walaupun masih bersifat lokal sehingga belum terpenuhi secara optimal setiap indikator pada penggunaan model *good tourism governance* dan model *public private partnership*. Dengan demikian, tatakelola pariwisata di tenjolaya harus berfokus pada *good tourism collaboration* sehingga dapat tercapainya tujuan kepariwisataan di tenjolaya yang berlandaskan pada pemenuhan indikator-indikator yang mendukung *good tourism governance*, *good tourism development* dan *good tourism sustainability*.

Kata kunci: Collaborative Governance, Keberlanjutan Pariwisata, Pengembangan Pariwisata, Tatakelola Pariwisata.

Wahyudin, C., Firliandoko, R., Amalia, N., & Zulfa, A. A. (2024). Model Tatakelola Pariwisata Berbasis Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Governansi*, 10(2): 147-164.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan suatu destinasi wisata yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan dapat mengentaskan angka kemiskinan di daerah. Dengan adanya pengembangan terhadap pariwisata berkelanjutan maka menjadi peluang bagi masyarakat setempat dalam mengurangi pengangguran dan dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan pada masyarakat daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata harus dikelola dengan sangat baik sehingga dapat mendatangkan kebermanfaatan.

Namun, pengelolaan pariwisata yang tidak tepat dapat menimbulkan masalah seperti degradasi lingkungan, pariwisata yang berlebihan, dan manfaat ekonomi yang tidak merata. Oleh karena itu, pengembangan pengelolaan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan sangatlah penting. Salah satu pendekatan pengembangan pariwisata adalah pengelolaan pariwisata yang berbasis kolaboratif. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat local dan LSM, dalam pengelolaan pariwisata.

Melalui kerja sama ini, berbagai pihak dapat berkontribusi dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata dengan tujuan saling menguntungkan dan berkelanjutan. Hal demikian sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi proses tata kelola. Ketiga aktor tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat (Abidin, 2013; Wahyudin, Apriliani, *et al.*, 2023; Wahyudin, Subagdja, *et al.*, 2023). Ketiga subjek ini saling berkolaborasi dalam proses pengelolaan negara. Pemerintah

bukan lagi satu-satunya entitas yang memonopoli penyelenggaraan pemerintahan. sebaliknya, hal ini memerlukan aktor lain karena terbatasnya kapasitas pemerintah. Pihak swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah menjalankan pemerintahan. Dalam hal ini pihak swasta tidak diperbolehkan untuk melindungi kepentingannya, yakni hanya mencari keuntungan pribadi.

Sebagaimana hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam tatakelola pariwisata harus dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di suatu daerah (Apriliani *et al.*, 2018, 2023; Kedasi Silayar, Ika Sartika, 2021).

Kecamatan Tenjolaya yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, merupakan kawasan dengan potensi wisata yang menjanjikan. Adapun potensi pariwisata yang ada di daerah tenjolaya terdiri dari tiga kelompok pariwisata. Pertama, wisata budaya/religi yang ada di kecamatan tenjolaya seperti pemanfaatan cagar budaya yaitu wisata situs cibalay dan arca domas. Kedua, wisata alam yang ada di kecamatan tenjolaya seperti pemanfaatan keindahan alam yaitu terdapatnya berbagai macam curug meliputi curug ciampea, curug cipeuteuy, curug hiji, curug ciputri, curug kiara, curug sawer, wisata air telaga cibural, sungai, perkebunan, perhutanan. Ketiga, wisata buatan yang ada di kecamatan tenjolaya dalam pemanfatan-pemanfaatan sumber daya alam yang ada seperti kolam renang aldepos, camping ground tenjolaya.

Namun, potensi-potensi wisata tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga masih kurangnya ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di tenjolaya karena belum adanya pengembangan

pariwisata yang berkelanjutan dalam pengelolaan potensi destinasi wisatanya. Sedangkan untuk memaksimalkan potensinya, pengembangan pariwisata di Kecamatan Tenjolaya harus didukung dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengidentifikasi penelitian tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif dalam pengembangan pariwisata dengan output dalam penelitian ini yaitu memberikan rekomendasi model tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif sehingga akan berdampak pada pengembangan pariwisata berkelanjutan yang ada di kecamatan tenjolaya kabupaten bogor. Dengan demikian, penelitian ini akan membawa manfaat yang sangat besar dengan adanya kolaboratif antara pelibatan pemerintahan, masyarakat dan sektor swasta bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan serta akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat lokal, lingkungan hidup, dan perekonomian.

MATERI DAN METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kerangka konseptual model *Good Tourism Governance* menurut Sunaryo, (2013) yang terdiri dari 10 prinsip dan model kemitraan pemerintah dan swasta (*public private partnership*) menurut Franco & Estevão, (2010) yang terdiri dari 7 prinsip, konsep-konsep ini menjadi acuan dalam perancangan model tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif dalam pengembangan pariwisata di kecamatan tenjolaya kabupaten bogor.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode deskriptif digunakan peneliti untuk melakukan analisa wawancara secara mendalam mengenai tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif di tenjolaya, kemudian pendekatan kualitatif dilakukan wawancara kepada informan

dengan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari 28 orang, 2 orang informan dari pihak pemerintahan tenjolaya dan 26 orang dari pihak pokdarwis, informan penelitian tersebut dapat dianggap mampu menjawab pertanyaan peneliti mengenai tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif dalam pengembangan wisata di tenjolaya. Kemudian, untuk memperkuat hasil penelitian peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. setelah data terkumpul dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, catatan lapangan dan memo analitik serta elisitasi dokumen maka peneliti melanjutkan analisa pada data yang telah di dapatkan kemudian dikonfirmasi dengan teknik keabsahan data (Abdussamad, 2022; Afrizal, 2016; Harahap, 2020; Imanina, 2020; Utama & Mahadewi, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi wisata yang ada di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor sangat menjanjikan dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dilakukan pengelolaan yang sangat baik. Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor terdiri dari 7 desa, dari 7 desa tersebut setelah dilakukan identifikasi maka dapat ditemukan 3 desa yang memiliki potensi wisata menjanjikan diantaranya wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan untuk dilakukan pengembangan wisata. Sebagaimana pendapat Sekretaris Kecamatan Tenjolaya memaparkan bahwa:

“...Potensi untuk tempat wisata locusnya nanti bisa dari desa tersebut karena 3 desa ini potensial wisata ada aldepos kalau Tapos 1 arcadomas Tapos 2 ada gunung Malang itu gambaran awalnya...” (Sumber: Wawancara pada tanggal 18 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara bersama sekretaris kecamatan tenjolaya dapat diketahui bahwa terdapat 3 desa yang

mempunyai potensi wisata, diantaranya: Desa Tapos 1, Desa Tapos 2 dan Desa Gunung Malang.

Selanjutnya potensi wisata di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor memiliki banyak potensi wisata diantaranya wisata alam, wisata budaya/religi maupun wisata buatan. Namun dalam pengelolaannya pihak pemerintahan Kecamatan Tenjolaya baru melakukan organisir tatakelola pariwisata secara resmi pada tahun 2023 yang seiring dengan adanya pembentukan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) pada tingkat Kecamatan. Sebagaimana hasil wawancara bersama Camat tenjolaya yang menyatakan bahwa:

“...Kelompok sadar wisata di Kecamatan Tenjolaya dibentuk pada tahun 2023 yang dimana anggotanya terdiri dari perwakilan masyarakat dari setiap desa dan juga ada keterlibatan dari karang taruna sehingga mitra dari kami pemerintahan itu biasanya kami melibatkan langsung dari libid sektor kasi ketertiban umum dikawal dengan satpol PP itu yang selalu mendampingi dari kecamatan ini ke karang taruna untuk turun langsung ke lokasi, selain tingkat kecamatan ada juga karang taruna tingkat desa SK nya dari tingkat desa, kemudian melibatkan kepemudaan yang sudah jelas seperti ada kegiatan phbi tentunya...” (Sumber: Wawancara pada tanggal 18 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa tatakelola pariwisata di kecamatan tenjolaya kabupaten bogor sudah dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata pada tingkat kecamatan dan desa dengan pelibatan kemitraan yang dilakukan dari pihak pemerintahan, swasta dan keterlibatan masyarakat, sehingga dapat menjadi potensi adanya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Adapun identifikasi potensi wisata tersebut dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Potensi Wisata

No	Nama Desa	Potensi Wisata	Jenis Wisata
1	Desa Tapos 1	Curug Ciputri + Camping Ground	Wisata Alam & Buatan
		Curug Ciampea + Camping Ground	Wisata Alam & Buatan
		Curug Sawyer	Wisata Alam
		Curug Goong	Wisata Alam
		Curug Cipeuteuy	Wisata Alam
		Curug Muara	Wisata Alam
		Arca Domas (Situs Cagar Budaya)	Wisata Budaya/Religi
2	Desa Tapos 2	Watu Gulung (Tempa Kujang Tradisional & Panah Tradisional)	Wisata Budaya
		Wisata Rekreasi (Kolam Renang Al-Depos)	Wisata Buatan
3	Desa Gunung Malang	Curug Luhur	Wisata Alam
		Curug Hiji	Wisata Alam
		Talaga Ciburial	Wisata Alam
		Kampung Iстал	Wisata Budaya

Sumber: Hasil Penelitian 2024

Tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif menjadi salah satu perwujudan dalam pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, tatakelola pariwisata harus dilakukan secara terorganisir sehingga dapat mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Tatakelola

pariwisata di Kecamatan Tenjolaya dikelola oleh Lembaga pemerintahan yang melakukan kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat. Dalam memaksimalkan pengelolaan potensi wisata yang ada di kecamatan tenjolaya maka Lembaga pemerintah yaitu pihak Kecamatan Tenjolaya membentuk Kelompok Sadar Wisata yang diharapkan dapat mewujudkan pengembangan berkelanjutan dalam pemanfaatan potensi wisata yang ada di wilayah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.

Dengan demikian, peneliti melakukan analisa tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif kepada pihak Pemerintah Kecamatan dan Kelompok Sadar Wisata dengan menerapkan konsep *Good Tourism Governance* menurut Sunaryo, (2013) dan *Public Private Partnership* menurut Franco dan Estevão, (2010) untuk melihat sejauhmana tatakelola pariwisata yang dilakukan sehingga dapat terwujudnya keberlanjutan pengembangan pariwisata di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.

Good Tourism Governance Dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor

Pendekatan yang digunakan dalam mengukur tata kelola pengembangan pariwisata di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, dengan menggunakan konsep teori Sunaryo (2013) terdapat 10 Dimensi dalam Tata Kelola Pengembangan kepariwisataan yang baik (*Good Tourism Governance*) yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat Terkait

Partisipasi Masyarakat mempunyai peran penting dalam pembangunan atau pengembangan pariwisata sebagai pengawas atau *controlling* yaitu keikutsertaan dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata

(Ridwanullah et al., 2021). Kemudian, dalam mendukung pengembangan pariwisata alam, buatan dan budaya/religi diperlukan pengukuran dengan keterlibatan partisipasi masyarakat sebagai kontribusi aktif untuk mewujudkan tatakelola pariwisata yang baik.

Aspek partisipasi masyarakat dapat menjadi unsur utama dalam tatakelola pariwisata yang baik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dapat menjadi suatu penggerak yang menginisiasi untuk melakukan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan wakil ketua dan anggota pokdarwis kecamatan yang mengatakan bahwa adanya antusiasme keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di kecamatan tenjolaya dan demi terwujudnya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan maka masyarakat ikut terlibat dalam setiap kegiatannya serta memberikan dukungan kepada pihak pokdarwis dalam melakukan tatakelola pada setiap potensi wisata yang ada di setiap daerah kecamatan tenjolaya.

2. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan mempunyai peran penting dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan, para pelaku dan pemangku kepentingan harus dilibatkan secara aktif dan produktif. Oleh karena itu, kolaborasi dari setiap pemangku kepentingan pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat diperlukan keterlibatannya sehingga adanya sinergitas dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota pokdarwis yang mengatakan bahwa dalam proses pembangunan dan pengembangan pariwisata di kecamatan tenjolaya sudah adanya keterlibatan dari segenap para pemangku kepentingan

namun masih bersifat terbatas. Oleh karenanya, dalam melakukan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan tidak cukup dengan keterlibatan kepentingan secara daerah saja namun diperlukan keterlibatan secara menyeluruh mulai dari tingkat daerah, nasional dan internasional. Dengan demikian, maka keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan tersebut harus adanya kolaborasi secara aktif pada setiap kegiatannya sehingga dapat mewujudkan tatakelola pariwisata yang kolaboratif dan berkelanjutan.

3. Kemitraan Kepemilikan Lokal

Kemitraan Kepemilikan Lokal mempunyai peran dalam memberikan dan membuka kesempatan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Seharusnya melalui model kemitraan strategis, secara bersama masyarakat dilibatkan dalam mengembangkan dan memelihara bersama usaha-usaha fasilitas penunjang kepariwisataan serta restoran, hotel, cinderamata, dan transportasi wisata.

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota pokdarwis yang mengatakan bahwa sudah adanya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gebrak pasar untuk mewujudkan pengembangan UMKM. Pengembangan ini mempunyai tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga untuk pengelolaan pariwisata, kemitraan dengan masyarakat menjadi indikator yang harus ada. Kondisi dilapangan sendiri saat ini sudah ada beberapa yang menjadi mitra dari masyarakat seperti adanya galeri Baharudin di Kecamatan Tenjolaya yang menyediakan cinderamata khas wilayah tersebut, dihimpunnya umkm-umkm untuk menjadi bagian dari pengembangan kepariwisataan seperti tempat penempaan kujang, kemudian kemitraan dengan warga setempat untuk penunjang penyiapan *homestay*.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut mempunyai peran program

kegiatan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan harus menjamin bahwa sumber daya alam, budaya dan buatan yang ada dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional yang sudah baku, artinya penggunaan sumber daya dalam pembangunan kepariwisataan harus dapat digunakan secara berkelanjutan dan menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua pokdarwis yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan maka pokdarwis kecamatan tenjolaya melakukan mapping dalam pembangunan-pembangunan yang dapat mendukung pariwisata seperti menjaga kelestarian budaya sunda. Karena pada dasarnya pengembangan untuk memelihara kekayaan bumi untuk selalu diperhatikan dan membawa nilai edukasi serta ekonomi bagi warga sekitarnya, sehingga pengembangan yang dilakukan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan daerahnya.

5. Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat

Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat mempunyai peran dalam program kegiatan kepariwisataan, aspirasi dan tujuan masyarakat setempat hendaknya dapat diakomodasikan agar menimbulkan situasi atau kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat setempat. Seperti adanya kerjasama dalam pengembangan atraksi wisata budaya atau *cultural tourism partnership* yang dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan atau manajemen, sampai tahap pemasaran.

Sebagaimana hasil wawancara dengan sekretaris pokdarwis yang mengatakan bahwa pokdarwis kecamatan tenjolaya sebelum perencanaan dan pelaksanaan program-program yang dapat mendukung pengembangan kepariwisataan maka dilaksanakan komunikasi terlebih dahulu bersama masyarakat setempat melalui

musyawarah sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kolaborasi yang baik dari setiap kegiatan-kegiatannya untuk dapat berjalan secara tentram, tertib dan harmonis serta masyarakat menjadi faktor pendukung dalam penyediaan akomodasi yang dapat mendukung kebutuhan wisatawan seperti penyediaan transportasi, oleh-oleh maupun *homestay*.

6. Daya Dukung Lingkungan

Daya Dukung Lingkungan mempunyai peran setiap pembangunan atau pengembangan kepariwisataan, daya dukung lingkungan harus ada dalam pelaksanaannya harus sesuai dan serasi dengan batas-batas kapasitas lokal yang ada tersebut. Hal itu merupakan sebagai pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan yang meliputi daya dukung fisik, biotik, ekonomi, dan sosial-budaya (Ridwanullah et al., 2021).

Sebagaimana hasil wawancara dengan sekretaris pokdarwis yang mengatakan bahwa dalam tatakelola pengembangan pariwisata oleh pokdarwis, sudah mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah/pengusaha/masyarakat dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan seperti pembangunan akses jalan tempat pariwisata. Kemudian kecamatan tenjolaya juga merupakan termasuk kawasan hijau dimana banyak kekayaan alam yang sudah jelas ketersediaan unsur abiotik dengan banyaknya geosite, curug dan sungai yang menjadi destinasi wisata dan sebagai penyeimbang lingkungan dan adanya unsur biotik tersedia seperti manusia sebagai penikmat manfaat pemelihara wilayahnya serta tumbuhan dan hewan yang masih banyak seperti masih adanya Lutung, Surili, Owa, pohon pinus, pohon Kiara dan masih banyak lainnya yang tersebar di area tersebut (Ridwanullah et al., 2021).. Selain itu dengan pertimbangan budayanya untuk diselalu dikedepankan agar menjadi ciri khas seperti adanya buda sunda serta dalam pembangunan fasilitas dilakukan dan

disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan untuk menunjang pariwisata namun pembangunan fasilitas masih terbatas karna tidak banyaknya anggaran yang mendukung.

7. Monitor dan Evaluasi

Monitor dan Evaluasi Program mempunyai peran dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan, program kegiatan mengawasi/ monitor dan evaluasi mencakup beberapa kegiatan yaitu penyusunan pedoman, evaluasi dampak dari kegiatan wisata untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua pokdarwis yang mengatakan bahwa dalam tatakelola pengembangan pariwisata dikecamatan tenjolaya belum terdapatnya pedoman untuk wisatawan dan peta wisata sebagai alat monitor bagi penyelenggara dan wisatawan. Sedangkan dalam pengembangan pariwisata telah dilakukan evaluasi dampak dari adanya kegiatan wisata yang biasa dilakukan pada satu tahun sekali secara terjadwal yaitu pada saat musrembang, namun disaat-saat tertentu evaluasi sesekali dilakukan setiap selesai kegiatan.

8. Akuntabilitas Lingkungan

Akuntabilitas Lingkungan mempunyai peran dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota pokdarwis yang mengatakan bahwa destinasi pariwisata yang ada di kecamatan tenjolaya dapat dipertanggung jawabkan lingkungannya baik dalam segi keamanan, kenyamanan dan ketentraman sehingga adanya pemberian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, adanya peningkatan pendapatan dan lain-lain. Dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan maka diperlukan beberapa aspek yang dapat menunjang dalam pengembangan yang saling berkaitan seperti aspek konservasi dan edukasi yang

memerlukan keterlibatan masyarakat sehingga menjadi kesempatan pekerjaan bagi masyarakat untuk menjadi tour guide didesa wisata, pemelihara situs arca domas atau yang lainnya, kemudian aspek budaya yang memerlukan pelestarian budaya setempat menjadi kesempatan pekerjaan bagi masyarakat untuk pemeliharaan dan pembuatan alat tradisional seperti penempa kujang ataupun yang berkaitan dengan wisata setempat, kemudian aspek akomodasi dimana disini masyarakat menjadi mempunyai kesempatan pekerjaannya seperti penyedia transportasi, menjaga villa, pelayan restoran, atau lainnya yang berkaitan. Serta adanya aspek kuliner yang menjadikan kesempatan pekerjaan masyarakat dituntun untuk berwirausaha dalam kuliner khas wilayahnya agar menunjang kegiatan pariwisata.

9. Pelatihan pada Masyarakat

Pelatihan Pada Masyarakat Terkait mempunyai peran terkait pembangunan kepariwisataan secara berlanjut selalu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, karenanya pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan untuk menjadi sarana pembekalan masyarakat dan untuk meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan *professional* (Ridwanullah et al., 2021).

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota pokdarwis yang mengatakan bahwa tatakelola pengembangan pariwisata dikecamatan tenjolaya, sudah merencanakan program pelatihan keterampilan masyarakat yang dapat mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan namun belum dilaksanakan secara penuh dan konsisten. Dengan demikian maka perlu adanya keterlibatan kolaborasi dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Pembekalan tentang pariwisata untuk penggiat pariwisata biasanya program tersebut dilaksanakan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor, dimana

dibagi perangkatan sesuai dengan wilayahnya, pembekalan tersebut berkaitan dengan peningkatan pengetahuan SDMnya baik dari segi kreatifitas maupun peningkatan bahasanya untuk mendukung wisatawan mancanegara.

10. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan mempunyai peran program-program promosi dan advokasi juga dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan secara berkelanjutan, diantaranya promosi dan advokasi penggunaan jalan, penggunaan lahan, dan kegiatan yang memperkuat karakter lanskap (*sense of place*) serta identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Penggunaan lahan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut harus bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas dan memberikan kepuasan bagi pengunjung atau wisatawan (Ridwanullah et al., 2021).

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota pokdarwis yang mengatakan bahwa promosi terhadap destinasi wisata yang ada di kecamatan tenjolaya sudah dilakukan secara online dan offline. Promosi yang dilakukan secara offline yaitu melalui sosialisasi ke sekolah sekolah seperti adanya eduwisata situs arcadomas, wisata budaya penempa kujang maupun wisata lainnya yang dapat mendukung kegiatan sekolah serta promosi dan advokasi kepada masyarakat dilakukan dikalangan masyarakat dengan cara sosialisasi melalui desa. Namun advokasi dan promosi dikalangan masyarakat sekitar harus terus dilakukan agar pemahaman pengembangan pengetahuan dapat menyeluruh. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui berbagai media social seperti melalui Instagram (@pokdarwis_tenjolaya), chanel youtube (@pokdarwistenjolaya), website (<https://pokdarwistenjolaya.com/>), tiktok (@pokdarwis.tenjolaya) serta melalui whatsapp pribadi maupun grup.

Public Private Partnership Dalam Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor

Pendekatan yang digunakan dalam mengukur tata kelola pengembangan pariwisata di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, dengan menggunakan konsep model *Public Private Partnership* menurut Franco & Estevão, (2010) terdapat 7 dimensi, diantaranya:

1) Persetujuan Secara Formal

Persetujuan secara formal pada pokdarwis merupakan suatu legalitas yang menjadi bentuk pengakuan atas pendirian kelompok sadar wisata, sehingga dalam proses implementasinya maka terdapat dukungan secara sah dari setiap kalangan seperti dukungan dari pihak pemerintahan, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, persetujuan secara formal diperlukan untuk memudahkan pokdarwis dalam melakukan tatakelola yang berhubungan dengan kepariwisataan sehingga dapat terhindarnya dari konflik-konflik yang dapat membawa dampak tidak baik bagi keberlangsungan pengembangan kepariwisataan. Kemudian, persetujuan secara formal juga merupakan suatu keputusan yang dicapai secara resmi, terakomodir dan terdokumentasi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan sekretaris pokdarwis yang mengatakan bahwa pokdarwis kecamatan telah memiliki legalitas organisasi untuk tatakelola pengembangan pariwisata di tenjolaya yang dibuktikan dengan terdapatnya surat keputusan camat nomor 147/002/1/Ktps/2024 tentang pembentukan kelompok sadar wisata Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor. Kemudian anggota pokdarwis juga mengatakan bahwa mereka telah dilantik menjadi pengurus pokdarwis dan mengetahui secara legal serta tertulis yang disahkan oleh camat kecamatan tenjolaya.

2) Deskripsi Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh kelompok sadar wisata dalam melakukan tatakelola

pembangunan dan pengembangan pariwisata, sehingga dengan adanya tujuan yang jelas menjadi tolak ukur dalam mencapai hasil yang diharapkan melalui suatu kegiatan, proyek maupun inisiatif lainnya yang dapan membangun, mengembangkan potensi-potensi yang ada di kecamatan tenjolaya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota-anggota pokdarwis mengatakan bahwa dengan dibentuknya kelompok sadar wisata maka berbagai macam potensi pariwisata yang ada di tenjolaya dapat dikembangkan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, tatakelola pariwisata di kecamatan tenjolaya oleh pokdarwis yaitu dengan menerapkan Good Government sebagai acuan dalam mendukung masyarakat untuk lebih peduli terhadap potensi-potensi wisata yang ada di lingkungan sekitarnya. Selain itu dengan tatakelola pariwisata yang kolaboratif oleh pokdarwis yaitu sebagai bentuk perwujudan percepatan pembangunan dan pengembangan wisata sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah maupun masyarakat dapat tercapai melalui pemanfaatan pariwisata.

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam tatakelola pariwisata oleh pokdarwis yaitu untuk memaksimalkan potensi wisata daerah yang sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten bogor tahun 2020-2025. Dengan adanya dasar hukum tersebut maka tatakelola pariwisata kolaboratif yang dilakukan oleh pokdarwis diharapkan dapat membangun fasilitas perekonomian masyarakat yang lebih maju, untuk membangun branding wisata yang ada di tenjolaya, untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, untuk membuka lapangan pekerjaan dan untuk melestarikan kebudayaan di tenjolaya. Kemudian, untuk mewujudkannya maka pokdarwis tenjolaya mempunyai tagline yaitu "ulin ka tenjolaya,

dijamin sagala aya". Dengan adanya tagline ini, maka diharapkan adanya penyebarluasan wisata tenjolaya, baik dalam negeri maupun luar negeri.

3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang mengatur bagaimana para pelaku pengelolaan pariwisata bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi ini bertujuan untuk mengatur hubungan, tanggung jawab dan arus informasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, industri pariwisata, LSM dan pemangku kepentingan lainnya, serta sektor swasta lainnya. Dengan struktur organisasi yang kuat dan komprehensif, tata kelola pariwisata yang kolaboratif dapat meningkatkan keberlanjutan industri pariwisata, meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial serta lingkungan industri pariwisata.

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota pokdarwis yang mengatakan bahwa pokdarwis sudah mempunyai struktur organisasi yang jelas yang menjadi dasar pokdarwis dalam melakukan tatakelola pariwisata di tenjolaya.

4) Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam pengelolaan wisata berbasis kolaboratif untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor merupakan sebuah konsep penting dan relevan dalam pengelolaan potensi wisata yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks demikian, kepemimpinan mengacu pada kemampuan seseorang atau kelompok dalam mengarahkan, mengkoordinasikan dan menginspirasi berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Sehingga kepemimpinan yang efektif dalam pengelolaan pariwisata kolaboratif harus bersifat inklusif, berorientasi pada tujuan bersama, dan mampu menjalin hubungan baik antar pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, dalam melakukan tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif pendekatan pengelolaan pariwisata harus

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat lokal, pemangku kepentingan pariwisata dan organisasi non-pemerintah (LSM), dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata. Dengan adanya kerja sama ini, menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan pariwisata, meminimalkan konflik, dan memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan maka pengembangan pariwisata di kecamatan Tenjolaya harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam mengidentifikasi dan pemanfaatan potensi pariwisata lokal, pengembangan infrastruktur pendukung, promosi pariwisata yang sesuai, serta perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan budaya.

Dengan demikian, kepemimpinan dalam pengelolaan pariwisata kolaboratif di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor harus mengedepankan koordinasi antar pemangku kepentingan, membangun kapasitas lokal, menjaga keanekaragaman budaya dan menjaga lingkungan untuk mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lainnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota pokdarwis yang mengatakan bahwa dalam melakukan tatakelola pariwisata yang dilakukan oleh pokdarwis sudah menerapkan pengelolaan dengan konsep kepemimpinan yang kolaboratif yaitu pengelolaan pariwisata di kecamatan tenjolaya sudah melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pelibatan pihak pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa.

Selain itu, ada juga pelibatan dari kalangan masyarakat yang antusias dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di tenjolaya. Namun, masih kurangnya dukungan-dukungan dari pihak swasta dalam melakukan pembangunan pariwisata di tenjolaya.

5) Fleksibilitas

Fleksibilitas pengelolaan pariwisata berbasis kolaboratif dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor menjadi aspek penting untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan pariwisatanya. Oleh karena itu, dengan memahami pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan pariwisata kolaboratif, para pemangku kepentingan di Kabupaten Tenjolaya dapat merancang dan menerapkan strategi pariwisata yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan wisatawan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua dan anggota pokdarwis yang mengatakan bahwa dalam melakukan pengelolaan pariwisata oleh POKDARWIS kecamatan/desa dilakukan dengan jam kerja fleksibel dan konsisten yang dapat menjadi kekuatan dalam melakukan tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif. Dengan memanfaatkan fleksibilitas dalam tatakelola pariwisata maka terdapat beberapa manfaat yang dapat mendorong pokdarwis dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata yaitu adaptasi terhadap perubahan, respon terhadap keberagaman, keterlibatan masyarakat local, inovasi dan kreatifitas, manajemen krisis serta evaluasi dan pembelajaran.

6) Jaringan Sosial

Jejaring sosial dapat menarik kerjasama pengelolaan pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor yang merupakan aspek penting serta berperan penting dalam meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan dan memfasilitasi pertukaran sumber daya, pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan jaringan sosial yang kuat dan inklusif menjadi elemen penting dalam kerja sama pengelolaan pariwisata di Kecamatan Tenjolaya. Melalui jaringan sosial yang kuat, para pemangku kepentingan dapat berkolaborasi secara

efektif untuk mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal dan pengunjung.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua, wakil ketua sekretaris dan anggota pokdarwis yang mengatakan bahwa jaringan social yang dimiliki oleh pokdarwis sudah ada namun masih dalam lingkup skala kecil sehingga masih diperlukan membentuk jaringan sosial dalam lingkup yang besar untuk membangun kerjasama dengan mitra-mitra yang dapat mendukung dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di tenjolaya serta mitra yang terlibat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di tenjolaya masih terbatas serta belum adanya mitra dari swasta yang dapat mendukung penuh dalam pengembangan pariwisatanya.

Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan jaringan social yang lebih luas lagi sehingga dapat menjadi pendukung utama dalam membangun dan mengembangkan pariwisata di tenjolaya.

7) Efektifitas dan efisiensi Kinerja

Efisiensi dan efektivitas kinerja merupakan dua aspek penting dalam kerjasama pengelolaan pariwisata dalam pengembangan pariwisata di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor. Kedua aspek ini saling bergantung dan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan. Dalam pengelolaan pariwisata berbasis kemitraan di Kecamatan Tenjolaya, efisiensi dan efektivitas harus menjadi inti dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan pariwisata. Melalui upaya yang efektif dan efisien, dampak positif yang signifikan dapat tercipta bagi masyarakat lokal, lingkungan hidup, dan industri pariwisata secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pengelola untuk mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan dan inklusif.

Sebagaimana hasil wawancara tentang program pokdarwis yang disampaikan oleh ketua, wakil ketua sekretaris dan anggota pokdarwis yang mengatakan bahwa efektifitas dan efisiensi kinerja pokdarwis sudah baik namun masih diperlukannya peningkatan-peningkatan dalam tatakelolanya sehingga apa yang menjadi potensi wisata di tenjolaya dapat dimanfaatkan, dibangaun dan dikembangkan dengan maksimal. Karna pada dasarnya efektifitas kinerja berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam pengembangan pariwisata. Sedangkan efisiensi kinerja berorientasi pada optimalisasi dalam pemanfaatan waktu, anggaran, dan infrastruktur dalam mencapai pariwisata yang berkelanjutan seperti optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pariwisata dan adanya produktifitas dalam penyediaan layanan pariwisata.

Model Tatakelola Pariwisata Berbasis Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor

Mengembangkan model pariwisata kolaboratif untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan di Tenjolaya, Kabupaten Bogor, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satu model pembangunan pariwisata berkelanjutan seperti *Community Based Tourism* (CBT) semakin banyak diterapkan di Indonesia (Agfianto et al., 2019). Model tersebut menekankan adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam pariwisata yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan kelestarian lingkungan (Sya et al., 2021). Dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata dapat menunjukkan adanya dampak positif yang dapat meningkatkan ekonomi berbasis kuliner, homestay, dan kerajinan sehingga menguntungkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Bahri et al., 2019). Destinasi yang di dukung sarana dan prasarana dalam pembangunan

pariwisata di berbagai daerah telah didorong oleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan berkat adanya partisipasi masyarakat lokal seperti dalam pengelolaan homestay (Syafrini et al., 2022). Oleh karena itu, dalam mewujudkan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat local dalam melakukan pengelolaan tempat wisata (Putra, 2020). Selain itu, dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan, juga bergantung pada konsep komunitas, yang menekankan bahwa masyarakat bukan hanya penerima tetapi juga partisipan aktif dalam proses pembangunan (Kurniawan, 2020). Kemudian untuk memastikan bahwa masyarakat lokal berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan pariwisata, pengembangan kearifan budaya juga dianggap sebagai strategi utama (Bhuanaputri et al., 2021).

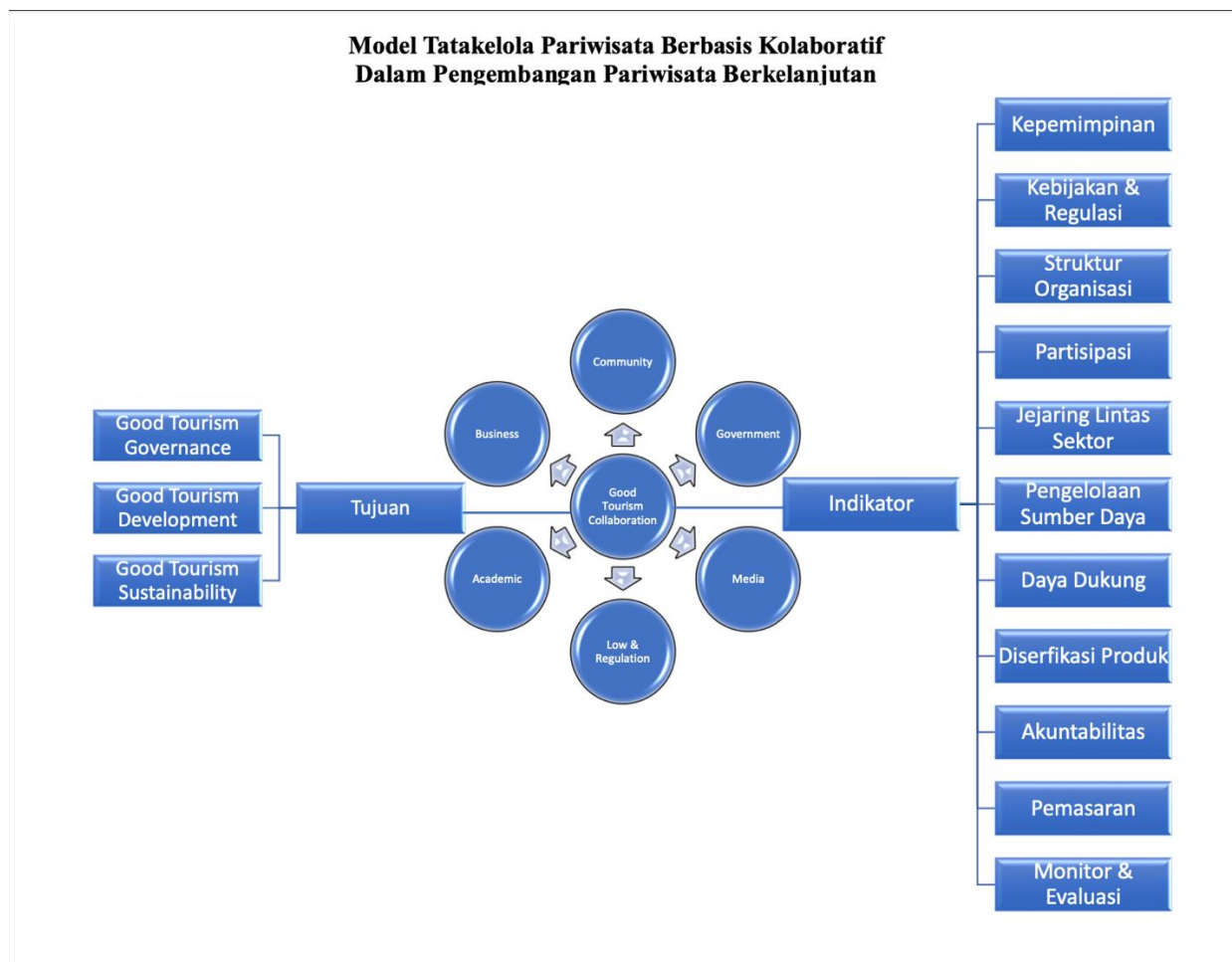
Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi yang dilakukan antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan hasil pariwisata yang berkelanjutan seperti adanya penerapan konsep pentahelix (Rosardi, 2020). Model pentahelix menekankan pada adanya keterlibatan dari berbagai aktor diantaranya dunia usaha, pemerintah, komunitas, akademisi, dan media dalam mewujudkan pengembangan pariwisata (Apriliani et al., 2018; Oka et al., 2021).

Namun, analisa hasil penelitian tatakelola pariwisata dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor menunjukkan perlu adanya peningkatan konsep dalam melakukan kolaborasi. Pendekatan konsep kolaborasi dengan model pentahelix dapat dikembangkan menjadi konsep kolaborasi model hexahelix untuk mencapai tujuan tatakelola pariwisata yang baik, pengembangan pariwisata yang baik dan keberlanjutan pariwisata yang baik. Konsep model hexahelix menekankan pada adanya kolaborasi dari berbagai aktor diantaranya komunitas, pemerintahan, dunia usaha, akademisi, media serta hukum dan regulasi untuk mewujudkan tujuan pariwisata

(Candranegara et al., 2022; Zakaria, Sophian, & Gusriani, 2019; Zakaria, Sophian, Muljana, et al., 2019).

Menerapkan konsep hexahelix dipandang penting untuk membangun tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, sehingga dapat mencapai tujuan dalam tatakelola, pembangunan/pengembangan, dan keberlanjutan pariwisata yang baik. Dalam mendukung tujuan tersebut, hasil analisa dari penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan analisa konsep dasar teori *Good Tourism Governance* menurut Sunaryo, (2013) yang terdiri dari 10 prinsip, yaitu: partisipasi masyarakat terkait yang belum terlibat secara penuh dalam mendukung pariwisata, keterlibatan segenap pemangku kepentingan masih bersifat terbatas, kemitraan kepemilikan lokal belum optimal, pemanfaatan sumber daya secara berlanjut masih perlu ditingkatkan, mengakomodasikan aspirasi masyarakat belum menyeluruh, daya dukung lingkungan belum dimanfaatkan secara optimal, monitor dan evaluasi belum dilakukan dari keterlibatan setiap aktor, akuntabilitas lingkungan baru dilakukan oleh pokdarwis dan kecamatan serta desa, pelatihan pada masyarakat belum maksimal, promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan masih jarang dilakukan. Selain itu analisa hasil penelitian juga menggunakan konsep dasar teori *Public Private Partnership* menurut Franco & Estevão, (2010) yang terdiri dari 7 prinsip, diantaranya: persetujuan secara formal sudah ada, deskripsi tujuan yang jelas sudah ada namun belum tertulis secara legal, struktur organisasi sudah ada, kepemimpinan masih terbatas, fleksibilitas sudah diterapkan dalam tatakelola namun peminatan masih terbatas, jaringan social masih dalam lingkup lokal, efektifitas dan efisiensi kinerja belum optimal karena setiap pengelola mempunyai kesibukannya masing-masing.

Konsep *Good Tourism Governance* digunakan untuk analisa standarisasi dalam melakukan tatakelola pariwisata, sedangkan konsep *Public Private Partnership* digunakan untuk analisa kemitraan yang dapat mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dengan melihat kedua konsep tersebut, hasil analisa dari penelitian menunjukkan bahwa tatakelola pariwisata dalam pengembangan pariwisata di kecamatan tenjolaya kabupaten bogor dapat dikatakan belum optimal, hal ini dapat dibuktikan seperti peminat jumlah pengunjung masih sedikit, sistem administrasi pengunjung belum tersedia, kemitraan yang dilakukan masih terbatas dan pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan belum mendukung secara penuh, sehingga diperlukan optimalisasi setiap indikator dari konsep *Good Tourism Governance* dan konsep *Public Private Partnership*. Optimalisasi indikator berdasarkan kedua konsep tersebut, peneliti merumuskan indikator-indikator yang dapat mendukung dalam mencapai tujuan kepariwisataan yaitu mewujudkan tatakelola pariwisata yang baik, mewujudkan pengembangan pariwisata yang baik dan mewujudkan keberlanjutan pariwisata yang baik. Adapun indikator-indikator yang dapat menjadi tolak ukur dalam mencapai tujuan tersebut, yang menjadi faktor keberhasilan dalam tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor diantaranya mempunyai 11 indikator, yaitu: kepemimpinan, kebijakan dan regulasi, struktur organisasi, partisipasi, jejaring lintas sektor, pengelolaan sumber daya, daya dukung, diserfikasi produk, akuntabilitas, pemasaran, serta monitor dan evaluasi. Dengan demikian, dapat dirumuskan suatu model tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor yang dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Model Tatakelola Pariwisata Berbasis Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Dengan melihat gambar 1 dapat diketahui bahwa ke 11 indikator tersebut menjadi acuan kolaboratif dalam keterlibatan aktor-aktor untuk mewujudkan *good tourism collaboration* berdasarkan konsep hexahelix untuk mencapai tujuan kepariwisataan, yaitu mencapai *good tourism governance*, *good tourism development* dan *good tourism sustainability*. Indikator-indikator tersebut menjadi prasyarat untuk melakukan tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.

Indikator kepemimpinan menjadi aktor kunci dalam tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, karena pada

dasarnya keterlibatan dari setiap stakeholder menjadi unsur utama dalam mewujudkan tujuan bersama kepariwisataan. Stakeholder yang terlibat setidaknya terdiri dari elemen pemerintahan, masyarakat dan swasta yang saling berkaitan dalam mendukung kepariwisataan sehingga koordinasi dari berbagai pihak dapat memfasilitasi dalam kolaborasi antar actor pariwisata.

Indikator kebijakan dan regulasi menjadi tolak ukur dalam penetapan aturan kepariwisataan sehingga dengan adanya regulasi yang jelas dan regulasi yang mendukung dapat memastikan bahwa adanya keterlibatan dari setiap aktor untuk memenuhi standar dan prinsip kepariwisataan yang berkelanjutan.

Indikator struktur organisasi menjadi penting karena struktur organisasi yang terkoordinasi dengan baik diantara para

pemangku kepentingan kepariwisataan sehingga dapat menjadi fasilitas koordinasi dan komunikasi yang efektif dari setiap aktor.

Indikator partisipasi berperan sebagai partisipasi aktif berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pariwisata sehingga akan memperkuat rasa kepemilikan bersama dan meningkatkan keberhasilan kerjasama.

Indikator jejaring lintas sektor merupakan langkah awal untuk membangun kolaborasi yang efektif dengan melibatkan lintas sektor, seperti pemerintahan, swasta, akademisi, media, komunitas/masyarakat serta lembaga-lembaga yang menjadi pendukung dalam kepariwisataan untuk mengintegrasikan perspektif dan sumber daya yang berbeda.

Indikator pengelolaan sumber daya merupakan aspek utama dalam pengelolaan sumber daya alam, budaya dan buatan secara berkelanjutan yang dapat menjadi kunci untuk memastikan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Indikator daya dukung menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa adanya sumber daya lokal yang memadai seperti infrastruktur, layanan kesehatan, dan transportasi, untuk mengatasi efek dari aktivitas pariwisata.

Indikator diversifikasi produk dapat menjadi suatu strategi untuk meningkatkan daya tarik destinasi, meningkatkan keberlanjutan pariwisata, dan mengakomodasi kebutuhan beragam wisatawan dengan cara yang positif dan berdampak baik yang mengacu pada pendekatan untuk mengembangkan dan menjual berbagai produk atau pengalaman wisata di suatu tempat dengan destinasi yang berbeda-beda serta mempunyai tujuan untuk mengurangi tekanan pada atraksi utama yang ramai, menarik berbagai jenis wisatawan, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pariwisata yang berkelanjutan sehingga adanya variasi pengalaman wisata, segmentasi pasar, mengurangi

overcrowding, meningkatkan pendapatan dan pengembangan berkelanjutan.

Indikator akuntabilitas mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab untuk bertindak secara transparan, etis, dan bertanggung jawab dalam manajemen, pengelolaan, dan pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan dengan mencakup akuntabilitas terhadap masyarakat lokal, lingkungan, pemerintah, dan wisatawan. Sehingga konsep akuntabilitas dapat mencakup transparansi, pengelolaan dana dan sumberdaya, partisipasi masyarakat, pemeliharaan lingkungan serta adanya kualitas keamanan dan kenyamanan.

Indikator pemasaran merupakan suatu proses yang dirancang secara strategis untuk mempromosikan dan memasarkan destinasi pariwisata ke berbagai target pasar dengan tujuan untuk menarik wisatawan, meningkatkan kunjungan, dan mempromosikan pengalaman yang baik bagi pengunjung. Dalam pemasaran pariwisata, berbagai strategi dan media komunikasi digunakan untuk mencapai audiens yang tepat dan memengaruhi keputusan perjalanan wisatawan. Adapun konsep pemasaran dalam kepariwisataan dapat melalui branding destinasi, promosi secara offline maupun online, segmentasi pasar, penetrasi pasar, kemitraan dan kolaborasi, penggunaan teknologi dan pengukuran kinerja.

Indikator monitoring dan evaluasi merupakan sistem yang dirancang untuk mengawasi, mengevaluasi, dan menilai kinerja serta pengaruh kegiatan pariwisata terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi maka dapat menjamin keberhasilan, efisiensi, keberlanjutan, dan dampak positif dari pengembangan pariwisata.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Hasil analisa penelitian berdasarkan konsep *Good Tourism Governance* dan

konsep *Public Private Partnership* menunjukkan bahwa tatakelola pariwisata yang dilakukan oleh pokdarwis dan pemerintah kecamatan/desa belum optimal hal ini disebabkan karna masih rendahnya pengetahuan SDM dalam melakukan tatakelola pariwisata yang baik dan belum adanya kolaborasi dukungan pembangunan secara penuh dari pihak pemerintahan maupun swasta dalam sarana dan prasarana untuk mewujudkan pengembangan pariwisata di tenjolaya sehingga belum terlaksananya dengan optimal pembangunan kepariwisataan di kabupaten bogor yang sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten bogor tahun 2020-2025. Sedangkan potensi wisata di tenjolaya cukup beragam yang terdiri dari wisata alam berjumlah 9 potensi, wisata budaya/religi berjumlah 3 potensi, dan wisata buatan berjumlah 3 potensi.

Rekomendasi model tatakelola pariwisata berbasis kolaboratif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor yaitu dengan menerapkan konsep *good tourism collaboration* yang di dukung dengan konsep *hexahelix* untuk mencapai tujuan *good tourism governance*, *good tourism development* dan *good tourism sustainability* yaitu dengan menerapkan indikator pencapaian, diantaranya: kepemimpinan, kebijakan dan regulasi, struktur organisasi, partisipasi, jejaring lintas sektor, pengelolaan sumber daya, daya dukung, diserfikasi produk, akuntabilitas, pemasaran, serta monitor dan evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Abidin, Y. (2013). *Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter*. Bandung: Refika Aditama.

Afrizal, M. . (2016). *Metode Penelitian*

Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Agfianto, T., Antara, M., & Suardana, I. W. (2019). Dampak Ekonomi Pengembangan Community Based Tourism Terhadap Masyarakat Lokal Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Destinasi Wisata Cafe Sawah Pujon Kidul). *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 5(2), 259–282. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2018.v05.i02.p03>
- Apriliani, A., Ramdani, F. T., Fitria, M., Wahyudin, C., Assayuti, M. jalaludin, Zulfa, A. A., Munawaroh, E., & Aryati, S. (2023). Cultural Reserve Edu-Tourism Governance. *Jurnal Qardhul Hasan; Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(3), 227–235.
- Apriliani, A., Rita, R., & Azahari, R. (2018). Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengembangan Wisata Geopark Ciletuh-Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. *Administratie Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 30–38.
- Bahri, A. S., Sylvester L, V., & Lesmana, D. (2019). Pemberdayaan Perempuan Pada Bidang Homestay di Desa Wisata Batulayang Kecamatan Cisarua, Bogor-Jawa Barat. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, 1(1), 41–48.
- Bhuanaputri, N. K. A. W., Putra, I. P. R. D., Wahyudi, I. M. I., Ratih, N. M. A. C., & Adam, M. D. (2021). Konsep Community Based Tourism Sebagai Strategi Pengembangan Kain Songket Sidemen di Bali. *Syntax Idea*, 3(8), 1916–1923.
- Candranegara, I. M. W., Mirta, I. W., Sedana, I. D. G. P., & Wirata, G. (2022). Hexahelix Concept in The Development of Eco-Tourism Area in The Kelating Traditional Village Eco-Tourism Area, Kerambitan District, Tabanan Regency. *Iapa Proceedings Conference*, 144–157. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2022.688>

- Franco, M., & Estevão, C. (2010). O papel das parcerias público-privadas de turismo no desenvolvimento regional: proposta de um modelo conceptual. *Cadernos EBAPE.BR*, 8(4), 600–612.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Imanina, K. (2020). Penggunaan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Analitis dalam Paud. *JURNAL AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PUD*, 5(1), 45–48.
- Kedasi Silayar, Ika Sartika, D. M. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Renaissance*, 6(02), 859–874.
- Kurniawan, A. R. (2020). Tantangan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Pada Era Digital Di Indonesia (Studi Kasus Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Pangalengan). *TORNARE - Journal of Sustainable Tourism Research*, 3(1), 1–10.
<https://doi.org/10.24198/tornare.v2i2.25418>
- Oka, I. M. D., Sudiarta, M., & Darmayanti, P. W. (2021). Warisan Cagar Budaya sebagai Ikon Desa Wisata Kaba-Kaba, Kabupaten Tabanan, Bali. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(2), 163–169.
<https://doi.org/10.31091/mudra.v36i2.1459>
- Putra, D. P. B. P. (2020). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Carangsari. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(2), 1–15.
<https://doi.org/10.14203/jmb.v22i2.838>
- Ridwanullah, M., Rahmawati, R., & Hernawan, D. (2021). Pemetaan Tata Kelola Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Governansi*, 7(1), 9–18.
<https://doi.org/10.30997/jgs.v7i1.3106>
- Rosardi, R. G. (2020). Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten Batang Jawa Tengah. *Ristek: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 4(2), 7–17.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (1st ed.). Gava Media.
- Sya, A., Zid, M., Irma S, A., Putri, A. E., & Mainaki, R. (2021). Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan: Kasus Tanjung Lesung Provinsi Banten. *Jurnal Geografi, Edukasi Dan Lingkungan (JGEL)*, 5(1), 27–32.
<https://doi.org/10.22236/jgel.v5i1.5311>
- Syafrini, D., Nurlizawati, N., & Amelia, L. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Homestay Berbasis Komunitas Lokal di Desa Wisata Nagari Sungai Pinang, Pesisir Selatan Sumatera Barat. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 459–464.
<https://doi.org/10.24036/abdi.v4i2.397>
- Utama, I. G. B. R., & Mahadewi, N. M. E. (2018). *Metode Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*. Andi.
- Wahyudin, C., Apriliani, A., Ramdani, F. T., Pratidina, G., & Seran, G. G. (2023). a Bibliometric Analysis Collaborative Governance of Plastic Reduction Through the Transformation Industry. *Journal of Engineering Science and Technology*, 18(4), 85–93.
- Wahyudin, C., Subagdja, O., & Iskandar, A. (2023). Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. *Jurnal Governansi*, 9(2), 151–162.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.8004>
- Zakaria, Z., Sophian, R. I., & Gusriani, N. (2019). Environmental Aspect in

Infrastructure Planning Using Starlet-Perdana Model. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 248(1), 1–12.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/248/1/012013>

Zakaria, Z., Sophian, R. I., Muljana, B., Gusriani, N., & Zakaria, S. (2019). The Hexa-Helix Concept for Supporting Sustainable Regional Development (Case Study: Citatah Area, Padalarang Subdistrict, West Java, Indonesia). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 396(The 2nd International Conference on Smart City Innovation), 1–12.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/396/1/012040>